

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Proses bisnis suatu perusahaan dapat digambarkan melalui satu teori yaitu teori agensi. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat suatu kontrak hubungan antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal merupakan pihak yang berperan sebagai pemberi modal (*stakeholder*), sedangkan agen berperan sebagai pihak yang mengelola modal dan melaksanakan kegiatan bisnis. Prinsipal memberikan perintah kepada agen untuk melakukan kegiatan bisnis atas nama prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan dan membuat keputusan terbaik demi kemajuan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal atas wewenang yang telah diberikan, setiap periode yang sudah ditentukan, agen akan membuat laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan selama satu periode. Laporan keuangan inilah yang menjadi satu-satunya alat yang digunakan oleh prinsipal untuk melihat kinerja agen dalam mengelola perusahaan selama satu periode. Berdasarkan fakta inilah ditunjukkan bahwa prinsipal berada pada posisi inferior dimana prinsipal hanya memiliki akses yang terbatas untuk mengetahui kegiatan internal perusahaan.

Hubungan keagenan ini bisa menimbulkan masalah apabila pihak-pihak yang berhubungan memiliki perbedaan kepentingan. Prinsipal sebagai pemilik modal menginginkan adanya penambahan kekayaan dan kemakmuran bagi para pemilik modal, sedangkan para manajer sebagai agen juga menginginkan penambahan kemakmuran bagi mereka.

Dari pembahasan ini akan memunculkan dugaan bahwa ada kemungkinan perusahaan akan melakukan *window dressing* untuk mempercantik laporan keuangan yang diterbitkan sebagai akibat dari hak superior yang dimiliki agen atas pembuatan laporan keuangan. *Window dressing* merupakan strategi yang digunakan manajemen untuk memperbaiki performa perusahaan dalam laporan keuangan agar kinerjanya terlihat baik dan sesuai dengan ekspektasi investor. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi investor dan pihak lain yang berkepentingan karena menerima informasi yang asimetri dan ada kemungkinan berkebalikan dengan kenyataan. Dari dugaan inilah ditunjukkan perlunya keterlibatan dari pihak luar yang independen dan memiliki kompetensi untuk meningkatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan sesuai dengan kenyataan, sehingga memberikan informasi yang relevan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, muncul proses pengauditan sebagai upaya untuk meningkatkan keyakinan terhadap laporan keuangan yang akan diterbitkan oleh perusahaan. Menurut Boynton *et al* (2006):

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-aseri kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai perusahaan penyedia jasa pengauditan menjadi pihak independen yang dibutuhkan oleh perusahaan yang sudah *go public* sebagai upaya peningkatan keyakinan terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam melaksanakan prosesnya, salah satu bagian yang penting adalah membuat kesepakatan biaya atas jasa audit yang akan dikerjakan oleh auditor independen. Biaya ini dikenal dengan istilah *audit fee*. Surat Keputusan No. 2 tahun 2016 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengatur mengenai penentuan besarnya *audit fee*. Panduan tersebut dikeluarkan untuk seluruh anggota IAPI yang memiliki atau melakukan praktik akuntan publik mengenai besaran imbalan jasa audit yang sewajarnya dan pantas diterima auditor dalam melakukan jasa profesional sesuai dengan standar akuntan publik yang berlaku.

Kode etik akuntan publik juga mengatur bahwa penentuan *audit fee* berdasarkan kesepakatan antara Akuntan Publik dengan entitas kliennya yang tertuang dalam surat perikatan yang dimaterai, sebagai bukti adanya kesepakatan *audit fee* antara kedua belah pihak tersebut. Dalam menentukan besarnya *audit fee*, bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Cooper *et al.*, (2000) dalam Siboro (2007) mengartikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu pengambilan keputusan efektif yang dibangun melalui

kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan tanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Perusahaan yang mampu mencapai *Good Corporate Governance* akan memiliki tingkat pengelolaan bisnis yang baik dalam setiap prosesnya. Proses bisnis yang sudah dijalankan dengan baik dan sesuai prosedur akan menghasilkan output berupa laporan keuangan yang relevan dan mampu menggambarkan keadaan perusahaan secara nyata. Laporan keuangan yang relevan yang digunakan sebagai bukti audit dapat meurunkan risiko yang ditanggung oleh auditor eksternal dan kebenaran informasinya dapat meningkatkan akurasi opini yang nantinya akan dikeluarkan oleh auditor eksternal setelah melakukan proses audit. Dari dasar tersebut memunculkan dugaan bahwa *good corporate governance* memiliki pengaruh terhadap penentuan *audit fee*, dimana dengan keberhasilan perusahaan menerapkan *good corporate governance* dapat menurunkan risiko auitor serta memberikan bukti audit yang berkualitas dan akan memberikan dampak pada *audit fee*.

Kompleksitas perusahaan merupakan hal yang berkaitan dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan. Kerumitan tersebut dapat berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, jumlah anak dan cabang perusahaan, maupun adanya operasi bisnis di luar negeri (Rukmana dkk, 2017). Semakin tinggi kompleksitas perusahaan maka semakin rumit juga transaksi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan membuat pekerjaan auditor eksternal dalam melaksanakan proses auditnya

akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal inilah yang diduga akan mempengaruhi penentuan *audit fee* bagi perusahaan tersebut.

KAP spesialis memiliki kemampuan untuk mengetahui kondisi industri tertentu sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi. KAP spesialis juga memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mendeteksi adanya praktik manajemen laba (Rusmin, 2010). KAP besar memiliki insentif untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya (DeAngelo, 1981). Semakin sering KAP melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang mempunyai jenis yang sama, maka KAP tersebut merupakan KAP spesialis dalam kelompok industri, serta semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik tersebut. Spesialisasi yang dimiliki KAP dapat memberikan pengaruh dalam penentuan *audit fee*.

Hay (2013) dalam penelitiannya telah melakukan *meta-analysis research* dengan mengumpulkan berbagai penelitian dengan topik utama penentuan *audit fee* dengan berbagai macam variabel. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat variabel yang memberikan hasil yang signifikan (ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, risiko perusahaan, *corporate governance*, *big 4*, *individual firms*, spesialisasi KAP) dan juga tidak signifikan (internal audit, *tenure*), namun dari hasil yang signifikan tersebut masih terdapat inkonsistensi hasil dimana dalam variabel yang sama terdapat hasil yang berlawanan yaitu signifikan negatif dan signifikan positif.

Selain itu pengungkapan *audit fee* dalam laporan keuangan masih bersifat *voluntary disclosure* dan belum ada peraturan yang mewajibkan pengungkapan

terhadap *audit fee*. Sampai saat ini masih banyak perusahaan yang hanya mengungkapkan *professional fee* yang merupakan keseluruhan jumlah *fee* yang dibayarkan kepada penyedia jasa profesional dan tidak secara spesifik mengungkapkan besarnya *audit fee*. Hal ini menjadi pertimbangan bagi peneliti untuk meneliti kembali faktor-faktor yang masih relevan dan menurut hasil penelitian sebelumnya memberikan pengaruh yang menjadi penentu besarnya *audit fee*, dan untuk meningkatkan konsistensi terhadap hasil dari penelitian yang sudah ada.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Spesialisasi Industri KAP, dan *Good Corporate Governance* terhadap *Audit fee*”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Proses audit menjadi salah satu bagian vital dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan, dimana opini yang dihasilkan oleh auditor eksternal menjadi salah satu pertimbangan dalam mengetahui kualitas laporan keuangan suatu perusahaan, serta sebagai acuan dalam menentukan sikap oleh *stakeholder* terkait kepentingan dengan perusahaan tersebut. Pengauditan memang memiliki posisi yang penting dalam memberi cerminan kualitas perusahaan dilihat dari laporan keuangannya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa proses pengauditan masih memiliki banyak hal yang masih diperdebatkan, salah satunya adalah penentuan *audit fee*.

IAPI memaparkan bahwa besaran *audit fee* (imbalan jasa audit) yang sewajarnya dan pantas diterima auditor dalam melakukan jasa profesionalitas sesuai

dengan standar akuntan publik yang berlaku. Hal ini mendorong orang-orang yang memiliki kepentingan untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap penentuan *audit fee*. Namun demikian, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan hasil yang kurang konsisten sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan data yang lebih *up to date* dan mengambil obyek penelitian yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang diharapkan dapat memberikan hasil yang relevan dan bersifat umum sehingga bisa memberikan manfaat bagi semua jenis bidang usaha. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah Kompleksitas Perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee*?
2. Apakah Spesialisasi KAP berpengaruh terhadap *audit fee*?
3. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *audit fee*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kompleksitas Perusahaan, *Good Corporate Governance*, dan Spesialisasi KAP terhadap *audit fee*.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Teori

Kontribusi teori dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengambil topik sejenis, dan diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

2. Kontribusi Praktis

Kontribusi Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan tentang penentuan *audit fee* sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mencari kesepakatan besarnya *audit fee* antara manajemen dengan auditor eksternal, serta untuk memberikan keyakinan bahwa berapapun *audit fee* yang telah disepakati, KAP akan konsisten menerapkan Sistem Pengendalian Mutu yang sudah ditetapkan sesuai dengan ISQC (*International Standards on Quality*).